

## KRISTENISASI DI PULAU DEWATA PADA ERA KOLONIAL BELANDA

Tri Wahyuning M. Irsyam

Departemen Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya  
Universitas Indonesia

Alamat korespondensi: titiirsyam@yahoo.com

Diterima/ Received: 16 Maret 2018; Disetujui/ Accepted: 30 Maret 2018

### Abstract

*This article discusses Christianization in Bali during the late XIX until XX century that was not only become religious phenomena, but also the pragmatical of government policy. It is compiled with historical method. According to the study, it can be delivered that Bali in the Dutch colonial era was in a tense situation. It was not only because the new religion came from the other parts of the world and therefore considered as alien by the local community based on Hinduism, but also discrimination against the zending institution conducted by the colonial regime. In the macro policy level, the government put into zending and mission became counterpart as well as media to conquer and civilize the colonies in order to face of Islamic radicalism as a common enemy. However, the government viewed that Bali as a strategic partner against the common enemy. Christianization was feared to lead a strong rejection from the Balinese people and ultimately led to resistance of the government. Therefore, the government prohibited zending in Bali despite the reasons that were not commonly found in the dominant politics of cultural preservation.*

**Keywords:** Zending; Christenization; Islamophobia; Civilization; Bali.

---

### Abstrak

Artikel ini membahas Kristenisasi di Bali pada akhir abad XIX hingga XX yang dilihat bukan sekedar sebagai fenomena keagamaan, tetapi juga objek kebijakan pemerintah yang pragmatis. Artikel disusun dengan menggunakan metode sejarah. Berdasar pada kajian yang telah dilakukan dapat disampaikan bahwa Kristenisasi di Bali pada era kolonial Belanda berlangsung dalam situasi yang penuh ketegangan. Bukan saja karena agama baru itu berasal dari belahan dunia lain dan karena itu dianggap asing oleh masyarakat tempatan yang didasarkan pada Hindusime, tetapi juga karena adanya diskriminasi terhadap lembaga zending yang dilakukan oleh rezim kolonial sendiri. Dalam struktur kebijakan makro, pemerintah menjadikan zending dan misi sebagai mitra sekaligus sarana penting dalam penaklukan dan pemberadaban penduduk koloni Hindia Belanda serta dalam menghadapi radikalisme Islam sebagai musuh bersama. Namun, di Bali, pemerintah lebih melihat Bali sebagai mitra yang strategis untuk melawan musuh bersama itu. Kristenisasi dikhawatirkan akan menimbulkan reaksi penolakan yang keras dari masyarakat Bali dan akhirnya bermuara pada perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah. Oleh karena itu pemerintah melarang aktivitas zending di Bali kendati dengan alasan yang tidak lazim ditemukan dalam politik dominasi yaitu pelestarian budaya.

**Kata Kunci:** Zending; Kristenisasi; Islamophobia; Pemberadaban; Bali.

### PENDAHULUAN

Pulau Bali dan masyarakatnya menempati posisi yang unik dalam perkembangan pembentukan bangsa Indonesia. Keunikkan itu tidak hanya

terletak pada kehidupan sosial budaya suku Bali sebagai satu-satunya etnis Indonesia yang didasarkan pada agama Hindu, namun juga dalam historiografinya. Penulisan sejarah tentang masyarakat dan Pulau Bali terbatas pada

perkembangan sejarah politik, ketika Bali menjadi objek dari proses dinamis sosio politik khususnya sebagai akibat dari pengaruh kebijakan dan tindakan dari luar. Ekspansi asing terhadap Bali yang dimulai dari zaman Majapahit dan Mataram di Jawa (Battacharjee, 1981) hingga pasifikasi oleh kekuatan kolonial pada awal abad XX telah menjadikan Bali sebagai objek dalam historiografinya dan dalam historiografi nasional. Fenomena kecil yang menunjukkan inisiatif Bali hanya terbatas pada ekspansi militer oleh kerajaan Karangasem di Bali Timur ke Pulau Lombok pada akhir abad XIX yang dikaitkan dengan konteks penaklukan kolonial atas Pulau Lombok (van der Kraan, 1980: 59).<sup>1</sup> Sementara itu, pengaruh Bali di Blambangan lebih sebagai intervensi atau ikatan politik keluarga dalam konteks sejarah (Hanna, 2016: 20).

Keunikan yang lain dalam konteks historiografi Bali adalah sejarah sosialnya. Dalam perkembangan selama beberapa abad telah banyak terjadi proses perubahan dan integrasi sosial dalam masyarakat Bali, yang membuktikan adanya sifat dinamis dari masyarakat ini meskipun budaya Hinduisme tetap menjadi kekuatan yang dominan selama lebih dari satu milenium. Masuknya Islam dan penegakan pengaruhnya di Bali Utara membuktikan adanya integrasi sosial di bidang budaya pada masyarakat Bali. Demikian pula dengan warisan budaya Jawa yang menunjukkan adanya inkulturasi damai terhadap nilai-nilai budaya lokal telah menjadikan struktur masyarakat Bali mampu terbuka terhadap pengaruh dari luar (Boon, 1977: 150).<sup>2</sup>

Meskipun baru satu abad terakhir ini dan ada identifikasi dengan proses perubahan struktural besar yang ditimbulkan oleh dominasi kolonial di Bali, agama Kristen juga menjadi salah satu unsur asing yang masuk dan menyebar di kalangan terbatas masyarakat Bali. Perkembangan agama ini menunjukkan suatu gambaran yang ironis tidak hanya dari sisi agama yang berasal dari belahan dunia berbeda dan masih dianggap asing oleh masyarakat lokal, tetapi juga mengalami proses diskriminasi yang anehnya justru dilakukan oleh rezim kolonial sendiri. Pemerintah kolonial memandang Bali tidak hanya sebagai suatu bentuk keunikan budaya pribumi yang

wajib dilestarikan tetapi juga dari aspek religio-politik, Bali dianggap sebagai salah satu mitra dalam menghadapi musuh terbesar mereka, Islam. Penaklukan atas Pulau Bali yang berlangsung pada konteks temporal bersamaan dengan puncak Islamophobia di kalangan para pembuat keputusan kolonial mengakibatkan pandangan yang berbeda terhadap Bali dibandingkan dengan kekuatan lokal lainnya di luar Jawa. Hal ini mengakibatkan perbedaan dalam kebijakan rezim kolonial terhadap zending Kristen yang disiarkan di kalangan bawah masyarakat Bali (Wener, 1995: 331).<sup>3</sup>

Ketika para pemegang kebijakan kolonial Belanda baik di Eropa maupun di Hindia dicemaskan oleh munculnya kekuatan global yang berlandaskan pada pandangan ideologis transendental dan bersifat global, yakni gerakan Pan Islamisme, kecurigaan mereka terhadap kekuatan Islam sebagai ancaman utama dominasi kolonial mencapai puncaknya pada perempat terakhir abad XIX. Perang Aceh menjadi salah satu fenomena terbesar dari bentuk permusuhan kolonial Belanda terhadap Islam, selain tampak dalam berbagai kebijakan politik seperti dalam hal politik haji, subsidi terhadap kelompok keagamaan, dan pengawasan di sektor pendidikan bagi orang pribumi khususnya pengajaran agama (Protschy, 2011: 124).

Menghadapi kondisi yang demikian, rezim kolonial menggunakan dua kebijakan yaitu menyusun politik yang khusus ditujukan untuk melindungi diri terhadap radikalisme Islam, dan mencari mitra yang dapat dimanfaatkan untuk menghadapi musuh bersama (*common enemy*). Politik pertama dilakukan dengan memperkuat posisi pemerintah kolonial melalui birokrasinya dan menjauhkan penduduk pribumi dari ide-ide perjuangan Islam khususnya Pan-Islamisme yang mengarah pada radikalisme dan perlawanan bersenjata terhadap rezim kolonial. Hal ini dicetuskan melalui politik asosiasi kebudayaan yang memperkenalkan ide-ide kebudayaan Barat kepada penduduk pribumi agar mereka tidak lagi berorientasi pada ideologi keagamaan (Suminto, 1985: 39-40).

Sementara itu, bentuk kebijakan yang kedua adalah kemitraan, yang dilakukan dengan menjadikan lembaga zending dan gereja Kristen

sebagai pilihan utama. Kedua lembaga itu juga dianggap sebagai kekuatan moral yang mendukung penegakan hegemoni kolonial di Hindia Belanda seperti telah disampaikan oleh Ratu Wilhelmina dalam pidato pergantian abad dan dituangkan dalam Politik Etis (Fasseur, 2009).<sup>4</sup> Keberadaan institusi gereja dan zending akan mengurangi potensi perlawanan dan pandangan negatif masyarakat pribumi terhadap pemerintah kolonial. Zending dianggap akan mampu “menyelamatkan” orang pribumi yang masih kafir dari pengaruh Islamisme yang disiarkan oleh para ulama dan kekuatan pendukungnya (van der End, 2006: 290).<sup>5</sup>

Bertolak dari hal tersebut, kabinet Etis pertama dengan Menteri Koloni Abraham Kuyper yang didukung oleh partai-partai agama mengesahkan peraturan yang membuka seluas mungkin koloni Hindia Belanda bagi penyiaran agama Kristen, dan kemudian diikuti oleh masuknya misi Katolik meskipun dibatasi pada beberapa daerah. Aktivitas misionaris ini berlangsung bersamaan dengan program pasifikasi oleh rezim kolonial Belanda atas wilayah luar Jawa (*buitenbezittingen*) pada awal abad XX, terutama setelah berakhirnya Perang Aceh pada 1904. Meskipun tidak berlangsung secara bersamaan di suatu lokasi, aktivitas Kristenisasi di luar Jawa terjadi pada saat yang bersamaan dengan berkembangnya pola berpikir para pejabat kolonial sezaman. Oleh karena itu, Kristenisasi dianggap sebagai langkah peng-adaban terhadap masyarakat pribumi, selaras dengan politik asosiasi budaya yang diterapkan oleh rezim kolonial melalui pasifikasi (Gunning, 1913: 53).

Fenomena itu dapat berlangsung seiring karena terdapat kesamaan dalam aplikasi program kebijakan kolonial. Baik zending dan misi maupun pemerintah kolonial mendorong penggunaan fasilitas dan prasarana yang sama untuk mencapai tujuan mereka, yaitu pendidikan dan kesehatan. Pemerintah kolonial melalui program kebijakan Etis telah mendorong pembukaan banyak sekolah bagi anak-anak bumiputera mulai dari tingkat paling dasar (*volkschool*) hingga menengah (HIS) di luar Jawa. Begitu juga dengan pihak zending, pendidikan menjadi sarana utama bagi media

penyiaran ide-ide Kristen kepada masyarakat awam. Dalam pelaksanaan program ini, pemerintah juga berperan dengan memberikan subsidi atau setidaknya izin bagi pihak zending untuk mendirikan dan mengelola sekolahnya. Lewat sarana pendidikan ini, keduanya mampu menjangkau kehidupan paling dalam dari rumah tangga pribumi dengan menanamkan ide-ide peradaban Barat pada anak-anak mereka yang mengakibatkan terjadinya reorientasi pada pola pikir generasi hasil didikan sekolah Barat ini (Loenen, 1877: 187).<sup>6</sup>

Di sektor kesehatan, proses penetrasi kebudayaan Barat dalam kehidupan masyarakat pribumi juga berlangsung sukses. Aplikasi metode pengobatan Barat yang diterapkan oleh dokter-dokter pemerintah dan para pendeta dengan latar belakang pengetahuan medisnya berhasil menekan jumlah kematian baik akibat penyakit maupun kebiasaan buruk yang sebelumnya dianut oleh masyarakat, misalnya dalam hal melahirkan anak dan membesarkan anak. Program vaksinasi terhadap penyakit tertentu dan pengobatan model Barat dengan perawatan di poliklinik dan rumah sakit ternyata mampu menyelamatkan banyak nyawa penduduk pribumi. Akibatnya, tumbuh kepercayaan kepada keampuhan orang-orang asing ini dibandingkan kepada para penguasa pribumi mereka (Woller, 1943: 273).

Kenyataan itu juga membawa dampak positif bagi masyarakat pribumi, meskipun tujuan utama pemerintah kolonial adalah melakukan perubahan orientasi secara profan dengan membuktikan keampuhan peradaban Barat. Selama dekade kedua dan ketiga abad XX, pemerintah kolonial telah merasakan keberhasilan Politik Etis yang terbukti bahwa selama tiga dekade itu praktis tidak lagi terjadi perlawanan bersenjata berskala besar dari rakyat pribumi seperti pada abad XIX dan semakin mantapnya dominasi birokrasi kolonial dalam kehidupan publik. Dalam mewujudkan kondisi baru ini, peran serta pihak zending Kristen adalah membantu menyebarkan unsur-unsur peradaban Barat dan menekan radikalitas masyarakat (Spielvogel, 2012: 489).<sup>7</sup>

Akan tetapi, kondisi di Bali ternyata berbeda dari gambaran ideal pembentukan

struktur kolonial seperti yang disebutkan di atas. Mengingat Bali bukan merupakan pendukung peradaban dan kekuatan Islam, rezim kolonial tidak melihat adanya kebutuhan untuk mengkhawatirkan adanya radikalisme. Kekuatan Islam di Bali dianggap sangat kecil dan dapat dikontrol oleh struktur sosial yang ada tanpa intervensi kekuatan politik mereka (Robinson, 1998: 6).<sup>8</sup> Di samping itu, para pejabat kolonial melihat otentisitas budaya Hindu yang masih utuh di Bali yang wajib dipelihara dan dijaga. Mengingat Hindu sebagai agama memberikan kontribusi yang sangat besar bagi pelestarian budaya ini, rezim kolonial mengkhawatirkan bahwa terkikisnya nilai-nilai Hindu dalam kehidupan sosial masyarakat Bali akan membawa dampak negatif di sana (McIntosh, 2014: 67).

Bertolak dari pandangan tersebut, rezim kolonial berusaha untuk melindungi dan menjaga keutuhan dan keaslian budaya dan struktur sosial Bali sejauh dapat dimanfaatkan untuk kepentingannya. Salah satu dari faktor yang dianggap membahayakan keutuhan ini sebaliknya adalah aktivitas zending Kristen dan misi Katolik. Rezim kolonial memandang bahwa aktivitas kedua lembaga gereja ini di Bali akan membawa dampak negatif yang lebih banyak dibandingkan dampak positifnya. Setidaknya, masuknya zending dan misionaris akan memicu reaksi keras dari masyarakat Hindu yang akan membawa pulau ini ke dalam pergolakan dan kerusuhan karena penetrasi nilai budaya Kristen akan menyentuh inti dan fondasi struktur budaya Bali lewat proses konversi. Meskipun pemerintah kolonial telah menetapkan Bali sebagai daerah yang tertutup bagi kegiatan zending dan misionaris, pihak gereja dan lembaga zending baik Kristen Protestan maupun Katolik terus berusaha memasukkan nilai-nilai keilahian dalam masyarakat Bali yang dianggap masih berada dalam kegelapan karena belum memperoleh pencerahan Injil.

Dalam hubungan itu, dalam artikel ini dibahas mengenai Kristenisasi di Bali pada akhir abad XIX hingga awal abad XX yang dilihat bukan sekadar sebagai fenomena keagamaan tetapi juga objek kebijakan pemerintah yang pragmatis.

## METODE

Kajian ini dilakukan dengan menggunakan metode sejarah. Sumber-sumber pokok yang digunakan antara lain berupa *Staatsblad van Nederlandsch Indie*, *Koloniaal Verslag*, dan surat kabar sezaman di samping sumber-sumber sekunder. Setelah diperoleh fakta-fakta sejarah yang kredibel melalui kritik sumber, selanjutnya dilakukan interpretasi berdasar kronologi dan sebab akibat dan kemudian dikonstruksi menjadi kisah sejarah (*history as written*) (Garraghan, 1957).

## STRATEGI DAN KEGIATAN LEMBAGA KRISTEN

Kekuasaan kolonial Belanda pertama ditegakkan di Bali pada tahun 1849, setelah berakhirnya peperangan antara pemerintah kolonial Belanda melawan kerajaan Buleleng. Melalui kontrak politik, Belanda menempatkan wilayah Bali Utara ke dalam kekuasaan Hindia Belanda di bawah seorang asisten residen yang awalnya berkedudukan di Banyuwangi (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* 1849 No. 39). Untuk melaksanakan pengawasan atas dipatuhinya kontrak politik oleh raja Buleleng dan Jembrana, seorang kontrolir Belanda yang tunduk kepada pemerintah asisten residen ini ditempatkan di Singaraja. Meskipun pada prinsipnya pemerintah Belanda tidak ikut campur pada persoalan internal raja-raja Bali, termasuk di Buleleng dan Jembrana yang sudah membuat kontrak politik, kehadiran kontrolir ini menjadi awal dari intervensi politik kolonial terhadap kehidupan di Bali (*Koloniaal Verslag over het jaar 1856*, hlm. 34).

Prinsip utama pemerintah Belanda dalam kebijakannya di Bali adalah menjaga kestabilan agar tidak menimbulkan gangguan politik dan ekonomi. Untuk itu, terhadap elite penguasa lokal, pemerintah kolonial mengawasi secara ketat pergantian penguasa dan juga pelaksanaan kontrak politik (*Koloniaal Verslag over het jaar 1857*, hlm. 34). Sementara itu terhadap masyarakat Bali, pemerintah Belanda tidak mau ikut campur dan melarang aparatnya untuk bertindak berlebihan agar tidak menimbulkan

reaksi yang dapat menimbulkan konflik dan perlawanan terhadap mereka. Sikap non-intervensi juga ditunjukkan dalam konstelasi politik di Bali yang ditandai dengan polarisasi para penguasa lokal yang belum menjalin hubungan politik dengan pemerintah Batavia (*Koloniaal Verslag over het jaar 1864*, hlm. 19).

Namun demikian, niat pemerintah Batavia untuk mewujudkan harapan itu tidak dapat dicapai tanpa kehadirannya yang lebih intensif. Hal ini tampak dari perubahan pejabat kontrolir yang ditempatkan di Singaraja dengan seorang asisten residen yang memisahkan administrasi pemerintahan wilayah ini dari *afdeeling* Banyuwangi pada 1866 (*Staatsblad van Nederlandsch Indie* tahun 1866 Nomor 6). Peristiwa ini menandai langkah awal pemerintah Belanda untuk membawa Bali menjadi satuan pemerintahan tersendiri dan intervensi yang semakin intensif terhadap struktur politik dan kehidupan masyarakat Bali. Dasar pertimbangannya adalah bahwa di kalangan para pejabat tinggi kolonial, sistem pemerintahan raja-raja Bali yang saling bermusuhan tidak membawa keamanan dan kestabilan bagi masyarakatnya dan kehadiran kekuatan politik kolonial akan mengakhiri semua itu (*Koloniaal Verslag over het jaar 1867*, hlm. 298).

Perkembangan itu juga tidak luput dari pengamatan kalangan zending Kristen yang sejak 1860-an telah mulai menunjukkan minatnya untuk memperluas karya misionaris mereka di kalangan masyarakat pribumi Hindia. Yayasan zending Utrecht (*Utrechtsche Zendingsgenootschap*) yang selama 1865 menerima beberapa pemuda dari Jembrana yang dikirim untuk dididik di Batavia, menunjukkan minatnya untuk menconba menaburkan benih keselamatan di Bali. Untuk itu mereka menghadap kepada Gubernur Jenderal pada 1866 untuk meminta izin. Setelah izin diterima, dua orang pendeta dikirimkan oleh yayasan ini ke Buleleng. Mereka tinggal di sana untuk sementara dengan maksud mempelajari bahasa dan adat-istiadat Bali sebagai langkah awal bagi karya misionarisnya (*Koloniaal Verslag over het Jaar 1868*, hlm. 298).

Setelah memperdalam ilmu pengetahuan tersebut selama tiga tahun, pada 1869 keduanya menerima izin dari pemerintah Batavia untuk

melakukan penyiaran agama di kalangan masyarakat Bali (*Koloniaal Verslag over het jaar 1870*, hlm. 474). Bagi para pendeta Kristen yang untuk pertama kalinya tinggal di lingkungan dan melihat adat istiadat orang Bali, banyak dari nilai-nilai tradisi mereka yang dianggap bertentangan dengan ajaran humanis Kristen, misalnya perlakuan penguasa setempat terhadap kawulanya yang terlepas dari struktur sosial dan sistem kasta, tidak dibenarkan berdasar kaidah Kristen. Hal ini memperkuat tekad para pendeta zending untuk segera membebaskan masyarakat Bali dari kondisinya dan ini hanya bisa dilakukan melalui pengkristenan mereka (van Eck, 1897: 170).<sup>9</sup>

Tujuh tahun karya zending Kristen Protestan pertama dilakukan di Bali. Titik tolak dari pandangan Kristen adalah bahwa Bali masih merupakan dunia yang belum beradab menurut pandangan ajaran Kristen. Oleh karena itu, dua pendeta zending pertama yang disertai tugas, salah satunya adalah Rutger van Eck, mulai mendekati unsur masyarakat Bali yang tidak menjadi bagian penting dari struktur sosial keagamaan. Mereka menggarap orang-orang ini dan akhirnya pada 1873 pembaptisan orang Bali pertama berlangsung di Singaraja (*De Standaard*, 9 Juli 1877).<sup>10</sup>

Mereka yang dibaptis berasal dari kasta Waisya dan Sudra, di antaranya Gusti Wayan Nurat, Ida Putu Sideman dan istrinya Srumbung. Van Eck yang mengungkapkan keberhasilannya ini dianggap sombong dan arogan justru di kalangan para gereja Kristen sendiri, dan keberhasilannya dianggap semu. Beberapa orang dari yayasan zending Utrecht menganggap bahwa tindakan van Eck tidak maksimal karena ternyata Sideman bersedia masuk Kristen untuk menghindari hukuman sebagai seorang pematat, yang dibuktikan dari perkawinannya dengan Srumbung sebagai seorang wanita Sudra yang kaya dan memasok candu baginya. Oleh karena itu, pada 1875 serangan terhadap van Eck semakin gencar, terutama ketika seorang brahmana yang disegani di Buleleng melaporkan perilakunya yang dianggap menghina kasta Brahmana kepada raja Buleleng dan menyampaikannya kepada kontrolir. Akibat peringatan dari pemerintah, van Eck selanjutnya

digantikan oleh K. Wiggelendam pada 1877 (*De Locomotief*, 25 Agustus 1877).

Setibanya di Belanda, Rutger van Eck menyalahkan kebijakan pemerintah yang berdampak pada pemberhentiannya sebagai petugas zending di Bali. Dalam rapat umum ke-28 Masyarakat Geografi (*Aardrijkskundig Genootschap*) pada 15 Februari 1880 di Amsterdam, van Eck justru menyerang para pejabat pemerintah Belanda yang ditempatkan di Bali karena minimnya pengetahuan mereka tentang adat, tradisi, dan budaya masyarakat Bali. Dirinya yang melakukan pendekatan kepada masyarakat untuk memperoleh pemahaman tentang hal ini justru dipersalahkan dan akhirnya dilarang berkarya lagi di Bali (*Rotterdam Nieuwsblad*, 16 Februari 1880).

Tampaknya persoalan tersebut tidak berhenti di sana. Hubungan antara para pendeta zending yang ditempatkan di Bali dan aparat pemerintah kolonial tidak selalu harmonis. Beberapa pendeta yang merasa dihambat karyanya segera mengeluh kepada yayasannya tentang perilaku asisten residen Bali, sehingga pejabat ini pada bulan Januari 1881 harus meneruskannya kepada pengurus pusat yayasan zending. Begitu juga dengan laporan Pendeta Wiggelendam sebagai koordinator zending di Bali kepada Kreemer sebagai kepala yayasan zending Utrecht tidak sama dengan berita yang ditulis oleh aparat pemerintah (*Algemeen Handelsblad*, 31 Agustus 1881).

Tampaknya persoalan yang muncul tidak hanya terbatas dengan aparat kolonial, dengan masyarakat pribumi Bali juga mulai terjadi beberapa ketegangan sebagai akibat interaksi antara beberapa orang pendeta dalam karya mereka untuk menyiarkan Injil. Pendeta Smokkeldam sebagai salah satu pendeta pekerja yang berhubungan langsung dengan masyarakat Bali diberitakan menghilang pada pertengahan Agustus 1881. Di samping itu, keluhan banyak terdengar dari sikap Pendeta Wiggelendam sendiri yang dianggap eksklusif, suka mengkritik dan fanatik sehingga sering kali melontarkan ungkapan penghinaan kepada agama dan nilai-nilai tradisi Bali.

Peristiwa paling mengejutkan dialami oleh J. de Vroom, salah satu pendeta yang ditempatkan di Jagaraga. Perilakunya yang dianggap kasar dan menghina kepada orang Bali mengakibatkan reaksi masyarakat yang keras dan berakhir pada kejadian pembunuhan terhadap dirinya pada 8 Juni 1881. Pada 25 Juli 1881 Asisten Residen di Sukaraja dan utusan khusus pemerintah pusat yang menyelidiki hal ini menuduh bahwa perilaku para pendeta termasuk Wiggelendam telah menjadi penyebab kemarahan orang Bali karena mereka berbuat di luar kewenangannya di samping menyinggung perasaan rakyat di bidang kerohanian (*Soerabajasch Handelsblad*, 5 Agustus 1881).

Wiggelendam tentu saja tidak mau menerima kenyataan ini. Ia membantah bahwa semua tuduhan yang disampaikan oleh aparat pemerintah tidak sesuai dengan kenyataan karena tidak pernah ada orang Bali yang mengungkapkan ketersinggungannya kepadanya. Termasuk dalam perkara terbunuhnya Pendeta de Vroom, dalih yang disampaikan oleh mereka dianggap tidak sesuai dengan fakta. Wiggelendam bahkan menuduh pemerintah telah berkonspirasi untuk melarang karya Kristenisasi di Bali, terutama dengan memuat pernyataan palsu dalam pers. Pada 6 September 1881 K. Wiggelendam membuat bantahan di surat kabar dan mengangkat persoalan ini agar menjadi perhatian publik (*Soerabajach Handelsblad*, 12 September 1881).

Namun demikian, simpati publik akhirnya muncul juga, terutama terhadap janda dan anak-anaknya yang segera meninggalkan Bali pada Desember 1881 (*De Java Bode*, 1 Desember 1881). Sementara itu, pada sisi yang lain, sebagian opini publik juga menyalahkan pemerintah tentang diperkenalkannya izin yayasan zending berkarya di Bali yang dianggap sangat sulit diberikan pemahaman dan sudah memiliki struktur yang mapan. Kehadiran sebuah gereja dan rumah pendeta dari tanah yang dibeli di Jagaraga seharga f 4 ribu dianggap menjadi simbol kehadiran ancaman kerohanian dan ideologis bagi orang Bali. Kelompok ini bahkan mengkhawatirkan bahwa ketersinggungan orang Bali terhadap aktivitas dan kehadiran zending Kristen akan mengobarkan perlawanan rakyat

dan tidak mustahil Bali akan menjadi “Aceh kedua” (*Surinaamsch Courant en Gouvernement Advertentie*, 24 November 1881).

Pemerintah memandang situasi yang demikian itu tidak kondusif bagi peningkatan perluasan pengaruhnya di Bali. Pada Maret 1882 asisten residen Buleleng Vriesman kemudian menerima instruksi untuk mengakhiri polemik tentang peristiwa Pendeta de Vroom dan meminta kepada raja Buleleng untuk menyerahkan pelaku pembunuhan tersebut. Dari pelaksanaan perintah itu, ternyata diketahui bahwa pelakunya adalah orang Mengwi dan raja Mengwi segera menyerahkannya kepada asisten residen Buleleng dua orang pelakunya (*Soerabajasch Handelsblad*, 16 Maret 1882).<sup>11</sup> Atas dasar putusan pengadilan Belanda, keduanya dijatuhi hukuman mati (*Koloniaal Verslag over het jaar 1882*, hlm. 26).

Akan tetapi, persoalan sebenarnya bukan terletak dalam peristiwa itu, melainkan persoalan pribadi. Masalah yang timbul adalah pemerintah Belanda bertekad menghentikan aktivitas zending Kristen di Bali dan langkah pertama dilakukan pada September 1882 ketika Yayasan Zending Utrecht menerima surat dari Gubernur Jenderal agar menarik kembali semua pendetanya dari Bali. Langkah politis ini diperlukan mengingat pemerintah Belanda tidak mau terjadi kerusuhan berlatar belakang agama sebagai akibat aktivitas zending dalam rangka perluasan pengaruh politiknya. Ini semakin tampak jelas ketika pada bulan-bulan pertama 1882 sejumlah bangsawan dan brahmana Buleleng menunjukkan bentuk konspirasi berkarakter agama. Situasi ini segera memotivasi Batavia untuk mengambil tindakan dalam reorganisasi administrasi yang memuncak pada 1 Juli 1882 ketika karesidenan Bali dibentuk dan residen memiliki kewenangan untuk mengambil semua kebijakan termasuk juga usul bagi pelarangan terhadap zending di sana.

Penolakan terhadap kegiatan zending ini menjadi awal dari kebijakan pemerintah kolonial terhadap aktivitas dan karya misionaris Kristen di Bali selama pemerintahan mereka hingga 1942. Pembaharuan penolakan terjadi kembali pada 1935 ketika terjadi perubahan paradigma dalam politik kolonial terhadap upaya pelestarian

budaya Bali. Pemerintah menganggap bahwa karya zending di Bali tidak akan membawa banyak sukses. Bukti pertama ditemukan pada orang-orang yang telah dibaptis pada tahun-tahun pertama karya Kristenisasi dan akhirnya kembali memeluk agama Hindu setelah kepergian Yayasan Zending Utrecht (*Arnhemsche Courant*, 22 Desember 1882).<sup>12</sup> Begitu juga dalam kasus pembunuhan Pendeta de Vroom, pihak yayasan dianggap tidak siap untuk menyelesaikan persoalan internalnya (*Soerabajasch Handelsblad*, 8 Agustus 1882).<sup>13</sup>

Bagi pihak zending, peristiwa ini tidak hanya merupakan tantangan politik yang sangat besar, tetapi juga peringatan untuk mengubah strategi dalam karya penyiaran agamanya dan juga meninjau kembali kualitas para misionarisnya. Sebuah sekolah kecil yang sudah dirintis oleh Jacob de Vroom dan berhasil mendidik beberapa anak Cina yang tinggal di Buleleng menjadi salah satu modal awal, meskipun dari karya itu belum diperoleh banyak hasil. Beberapa orang yang dibaptis termasuk bangsawannya seperti Gusti Karangasem akhirnya kembali menjadi Hindu. Pada prinsipnya mereka kecewa karena harapan bahwa menjadi Kristen akan mendapatkan sesuatu yang istimewa dari pemerintah Belanda tidak menjadi realita (*Nederlandsch Zendingjaarboekje*, 1 Januari 1904).

## PERDEBATAN SEPUTAR PERIZINAN BAGI ZENDING DAN MISSI

Sampai dengan akhir abad XIX semangat untuk memulai kembali karya zending itu mereda dan baru pada tahun-tahun awal abad XX seiring dengan adanya motivasi dari kebijakan pemerintah Den Haag terhadap karya zending di Hindia Belanda. Dari pengalaman Yayasan Zending Utrecht, kalangan gereja Kristen menyadari bahwa sebenarnya orang Bali sebagai pemeluk Hindu tidak memiliki kefanatikan seperti pada umat Islam, namun sikap acuh terhadap perubahan.

Birokrasi kolonial dan struktur feodalistis yang dominan dalam kehidupan sosial masyarakat Bali dianggap sebagai hambatan terbesar bagi Kristenisasi. Penaklukan militer yang diikuti dengan proses pasifikasi atas wilayah

Bali di luar Buleleng dan Jembrana pada 1907, yang selanjutnya membuka peluang bagi reorganisasi pemerintahan di bawah seorang residen dengan dua asisten residen di Bali Utara dan Selatan (*Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1907 No. 449), tidak menjamin perubahan kebijakan kolonial terhadap zending Kristen. Kesulitan dalam mencari tenaga yang tepat bagi tugas itu juga menjadi kendala dalam penyiaran agama Kristen yang semakin sulit diatasi khususnya oleh Yayasan Zending Utrecht (UZV) yang telah berpengalaman di sana (*Gereformeerd Jongelingsblad*, 20 Maret 1914).

Namun demikian, harapan itu tidak selalu gelap. Residen pertama di Bali yang menyaksikan sendiri bagaimana sisi negatif menurut pandangan Barat dari aplikasi nilai-nilai adat setempat, berkomentar sebagai berikut.

*Zal hij (Balier) geleidelijk het verhevene van zijn godsdienst weten te scheiden van alle minderwaardige bestanddeelen, die daarin zijn opgenomen, en naar die verhevene beginselen handelende, zal de Balier in zijn leven en streven den rechtschappen Christen naderen of evenaren (Java Post, 17 November 1916).*

[Jika dia (orang Bali) secara perlahan berusaha membersihkan semua unsur kurang baik dari agamanya, yang dikandungnya, dan bertindak menurut prinsip yang mulia, orang Bali itu akan mendekati atau menyerupai ajaran Kristen dalam kehidupan dan usahanya.]

Meskipun tidak menunjuk secara tegas tentang perizinan bagi karya zending, residen ini jelas memiliki pandangan dengan menggunakan nilai-nilai Kristen sebagai standarnya dalam menilai kehidupan orang Bali. Menurut kriterianya, beberapa aturan adat Bali meskipun bersumber dari ajaran agama Hindu tetap dianggap tidak sesuai dengan kaidah kemanusiaan menurut standar Barat (van Eerde, 1911:2).<sup>14</sup>

Peluang ini segera dimanfaatkan oleh pihak zending untuk menyerang larangan pemerintah Belanda terhadap aktivitas misionaris di Bali.

Menurut pandangan para pendeta, pemerintah Belanda yang melarang mereka dan beralih netral dalam agama justru dianggap membiarkan sejumlah praktik kebiasaan yang dianggap tidak manusiawi itu (Hueting, 1914: 294). Kalangan zending sendiri juga mulai menyadari bahwa selama ini baik mereka maupun pemerintah selalu berpikir bahwa objek yang perlu dibaptis dan dikristenkan adalah umat Islam karena dianggap berbahaya bagi keberadaan peradaban Barat di tanah koloni. Namun, di Bali mereka menghadapi umat Hindu, dan dalam kaidah normatif lebih mirip penganut animisme dengan kepercayaan pada banyak roh daripada umat Islam yang monoteis. Tentu saja dalam hal ini suatu strategi yang berbeda harus disusun oleh zending agar mereka berhasil mencapai tujuannya (Stemmen des Tijds, 1914: 1351).

Pada pertengahan dekade ketiga abad XX desakan zending di atas tampaknya mulai memengaruhi pandangan pemerintah Belanda. Ketika kalangan bangsawan Bali yang diwakili oleh utusan mereka di *Volksraad* pada 1925, Soekowati, melontarkan kekhawatiran dalam pidatonya bahwa aktivitas zending akan meresahkan masyarakat Bali dan menimbulkan kerawanan kerusuhan, Gubernur Jenderal Fock menanggapi bahwa bukan tugas pemerintah untuk melindungi rakyat Bali terhadap pengaruh zending (*het niet de taak der Regeering was om Bali te beschermen tegen den invloed der Zending*) (*De Heraut voor Gereformeerd Kerken in Nederland*, 18 Januari 1925).

Di kalangan pemerintah sendiri mulai muncul kesadaran tentang kontribusi zending selama ini dalam penegakkan kekuasaan mereka khususnya di luar Jawa. Jasa zending bukan hanya terbatas pada sektor politik, tetapi juga ikut membantu dalam membawa peradaban Barat kepada penduduk di tanah koloni Hindia Belanda lewat berbagai jalurnya. Kini Bali tidak lagi menjadi objek pasifisasi politik meskipun pemerintah Belanda masih mempertahankan struktur kekuasaan lama, melainkan telah muncul pemahaman bahwa Kristenisasi di Bali merupakan perjuangan peradaban dan bukan penaklukan atau penegakkan keamanan (*De heraut voor de gereformeerde kerken in Nederland*, 28 Juni 1925).

Hal itu dilontarkan oleh anggota fraksi dari sayap kanan dalam *Volksraad*, Dr. Schmutzer, yang mengatakan bahwa Bali tidak mungkin dapat menutup diri terhadap perubahan dari luar. Pendidikan Barat yang mulai diterima di Bali sejak pertengahan kedua abad XX merupakan salah satu sarana untuk memajukan Bali, dan pihak zending dapat masuk lewat jalur ini karena kehadiran mereka untuk mengadabkan masyarakat juga dibutuhkan oleh pemerintah kolonial (*Nieuwe Rotterdamse Courant*, 20 September 1924). Schmutzer mencoba untuk membuka pandangan para pejabat kolonial tentang konsekuensi kebijakannya, yaitu ketika terdapat kenyataan bahwa pada 1929 organisasi Muslim moderen Muhammadiyah diperkenankan untuk membuka sebuah sekolah rakyat di Bali (*Nieuwe Rotterdamse Courant*, 3 Agustus 1929).

Peristiwa ini tidak hanya menegaskan ketidakadilan di pihak pemerintah, tetapi ancaman dari sisi Islam yang juga akan meruntuhkan struktur dan orientasi sosial masyarakat Bali. Akan tetapi, pemerintah tidak menanggapi kekhawatiran tersebut. Lembaga pendidikan tetap didominasi oleh sekolah pemerintah yang netral dalam agama, dengan sekolah terbesar *Hollandsch Inlandsche School* yang dibuka di Klungkung dan empat sekolah lain yang tersebar di Bali sampai akhir 1920-an. Mereka juga tidak percaya pada pengaruh Islam yang meluas karena tidak akan mampu melakukan penetrasi dalam kehidupan budaya Bali yang didominasi oleh Hinduisme yang kuat (*Soerabajasch Handelsblad*, 6 Juli 1931).

Pandangan ini digunakan oleh pemerintah untuk menolak permohonan lembaga zending dan misi untuk melakukan karya Kristenisasi di Bali. Jawaban ini tentu saja menimbulkan reaksi dari kalangan zending Kristen. Yayasan Injil Belanda (*Nederlandsch Bijbel Genootschap*) mengirimkan seorang utusan, Dr. Kreemer, yang dianggap ahli dalam hal pewartaan Injil ke Bali untuk melakukan pemantauan pada awal 1932. Berdasar hasil perjalanannya ke Bali ia menyimpulkan bahwa masyarakat Bali sebenarnya dapat responsif terhadap pewartaan Injil, namun memang saatnya belum tepat untuk

melakukan Kristenisasi (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 25 Mei 1932).

Ungkapan Kreemer ini bukan tanpa alasan karena adanya kejadian di Mengwi. Suatu usaha secara diam-diam untuk membaptis orang Bali di suatu desa di Mengwi berdampak pada adanya segregasi sosial dalam kehidupannya. Suatu desa Kristen segera terisolasi dalam hubungan sosial dengan masyarakat di sekitarnya, meskipun tidak terjadi gesekan atau konflik horizontal di permukaan. Namun, bagi para pendukung zending, semua itu dianggap sebagai kesalahan strategi. Kreemer memandang bahwa zending Kristen tidak boleh merusak atau menghancurkan struktur sosial tradisional Bali, tetapi memperbaharui dengan memasukkan nilai-nilai Kristen di dalamnya. Sistem kasta yang merupakan fondasi kehidupan sosial orang Bali warisan agama Hindu tetap dipertahankan, tetapi dapat dipengaruhi oleh nilai Kristen. Oleh karena itu, meskipun stratifikasi sosial atas dasar kasta tetap ada, peluang mobilitas vertikal dapat dibuka dengan jalur yang disediakan oleh zending seperti dengan lembaga pendidikan Barat (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 1 November 1932).

Kendala yang selama ini dianggap ada bagi aktivitas zending dan misi adalah pasal 117 dari UU Hindia (*Indische Staatsregeling*) tentang sikap pemerintah yang netral terhadap agama. Pihak Katolik yang juga berkepentingan untuk menyiarkan missinya di Bali melakukan serangan tajam terhadap keberadaan pasal ini, yang dilontarkan dalam khotbah oleh Pastur G. Babtist M.A.C. di Batavia pada akhir November 1932 (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 26 November 1932). Khotbah ini segera mendapatkan tanggapan dari publik, termasuk *Volksraad*. Salah seorang anggotanya, C.C. van Helsdingen, segera menyoroti keberadaan pasal ini khususnya menyangkut aktivitas penyiaran Injil oleh pihak Kristen dan Katolik di Bali. Van Helsdingen melontarkan pandangannya dengan mendukung opini G. Babtist (*De Indische Courant*, 28 November 1932).

Perdebatan menjadi semakin keras terutama dari pihak zending yang mengetahui bahwa pihak misi Katolik telah meneima izin untuk membuka perwakilannya di Bali Selatan pada 1920, meskipun terbatas untuk melayani

umat Katolik yang merupakan birokrat dan militer pemerintah. Sementara itu, sebuah lembaga zending dari Amerika Christian Missionaire Alliance yang juga diam-diam berkarya di antara orang-orang Tionghoa di kota-kota besar Bali pada 1930 berhasil membuktikan perolehan umat mereka. Pendeta D.F. Bartlema yang mengajukan beberapa contoh fenomena di atas menuntut pemerintah agar tidak lagi menggunakan pasal 117 IS untuk menghambat aktivitas zending di Bali (*Soerabajasch Handelsblad*, 2 Desember 1932).

Menghadapi desakan dari berbagai kalangan khususnya dari kaum agamis Kristen yang selanjutnya mulai didukung oleh para politikus, pemerintah mulai menunjukkan perbedaan sikap meskipun dalam hal prinsip hampir tidak ada perubahan. Wakil pemerintah Bosch menyatakan bahwa misi dan zending Kristen diizinkan untuk berkarya di Bali sejauh tidak mengubah orientasi dan kehidupan budaya orang Bali. Bosch mengungkapkan ketakutan bahwa agama Kristen akan mengurangi potensi kewajiban adat seperti kerja wajib demi kepentingan masyarakat. Ia beralasan bahwa beberapa pejabat pribumi Bali merasa keberatan terhadap perizinan zending, dan jika hal ini dipaksakan maka akan terjadi keresahan sosial (*De Indische Courant*, 3 Desember 1932).

Komentar Bosch itu segera mendapatkan reaksi keras dari pihak zending Kristen. Pendeta Hofker di Buitenzorg menganggap alasan Bosch terlalu dipaksakan. Selayaknya sikap netral pemerintah terhadap agama tidak dimaksudkan sebagai pelarangan, melainkan sebagai non-intervensi. Hofker juga menganggap bahwa Hinduisme merupakan tipologi kepercayaan tradisional yang mengandung banyak unsur non-manusiawi. Jika pemerintah membiarkan hal tersebut, berarti pemerintah Belanda menghambat pengadaban khususnya di Bali (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 6 Desember 1932).

Pembahasan tentang perizinan zending semakin hangat pada 1933. Sikap pemerintah yang mempertimbangkan perizinan bagi zending tergantung pada keamanan dan ketertiban dianggap oleh C. Lekkerkerker yang pernah bertugas di Bali sebagai pandangan oportunis. Menurut para pengamat zending yang berkumpul

di Yayasan Hindia (*Indische Genootschap*), zending hendaknya mempelajari bahasa Bali agar memudahkan interaksi dengan masyarakat dan menghilangkan kecurigaan elite lokal terhadap kehadiran zending di Bali. Dengan adanya interaksi sosial dan individu ini, bukan hanya perubahan sikap masyarakat Bali yang diharapkan tetapi juga kebiasaan buruk akan dihilangkan (Lekkerkerker, 1933).

Dalam *Volksraad*, pandangan Soekawati tetap disampaikan dan ia mendesak wakil pemerintah B.J.O. Schrieke agar memperhatikan tuntutannya (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 16 Februari 1933). Meskipun Schrieke mendukung Soekawati, sikap ini menuai kritik di kalangan Majelis Rendah Parlemen Belanda. Salah satu anggotanya, van Boetzelaer, menyalahkan Gubernur Jenderal de Jonge yang menyerahkan persoalan izin bagi misi dan zending di Bali kepada *Volksraad*, sementara pemberian izin itu merupakan kewenangan mutlak Gubernur Jenderal (*Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 22 Maret 1933).

Pendapat van Boetzelaer didukung oleh anggota *Volksraad* Monod de Froideville, yang berpendapat bahwa jika zending dianggap membahayakan keamanan kembali maka persoalan itu menjadi tanggung jawab pemerintah dan dalam hal ini Gubernur Jenderal (*Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie*, 5 Agustus 1933). Persoalan ini tetap menjadi agenda dalam pembicaraan sidang *Volksraad* selama 1930-an dan tidak dapat dicapai kesepakatan di antara perwakilan rakyat. Gubernur Jenderal de Jonge juga tidak mengambil keputusan, termasuk ketika mengadakan kunjungan ke Bali pada 1935. Kebijakan pemerintah tetap dipertahankan dan tidak ada izin bagi karya zending dan misi di pulau ini (*De Indische Courant*, 21 Februari 1935).

## STRATEGI BARU

Menghadapi situasi yang demikian maka pihak zending, dan kemudian diikuti oleh misi, menggunakan strategi baru. Tanpa berharap lagi pada keberhasilan perjuangan lewat jalur formal, pihak gereja Kristen memanfaatkan umat Kristen

dan Katolik yang telah dibaptis di kalangan orang Bali untuk melakukan propaganda. Meskipun residen Bali telah mendengar hal ini dari para kepala adat, pejabat itu tidak dapat bertindak karena tidak menemukan bukti bahwa lembaga zending telah melakukan penyiaran agama secara teratur (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 Februari 1935).

Strategi baru ini, ditambah dengan pendekatan oleh para gembala gereja yang menguasai bahasa Bali, ternyata menumbuhkan respons positif dari masyarakat Bali khususnya dari kalangan kasta bawah terhadap tawaran Injil. Banyaknya jumlah orang Bali yang bersedia menerima pelajaran Injil, digunakan oleh tokoh Parlemen dari kalangan Kristen, H. Kraemer, sebagai bukti bahwa sebenarnya prospek penyiaran agama Kristen di kalangan masyarakat Bali sangat cerah dan membuktikan kesalahan usul Soekowati dalam *Volksraad* yang selama ini diperdebatkan dan dilaporkan kepada Gubernur Jenderal (*Bataviaasch Nieuwsblad*, 15 Oktober 1935).

Dengan teratasinya kendala pertama, pihak zending dan missi mulai memasuki kehidupan internal dan legal orang Bali. Mereka secara bertahap mampu mengatasi kendala bagi penyiaran agama Kristen dalam kehidupan dan sistem sosial masyarakat, di antaranya adalah umat Kristen Bali tetap terjamin pada hak waris dan pembakaran mayat setelah mereka meninggal. Keduanya menjadi kendala terbesar bagi orang Bali untuk dapat menerima ajaran Kristen dan dibaptis. Setelah adanya jaminan dari pemerintah bahwa pemerintah tidak akan melakukan intervensi, peluang bagi penyiaran Injil semakin terbuka (*De Indische Courant*, 9 September 1935).

Hanya dalam waktu satu tahun kondisi penyebaran Kristen telah berubah. Seorang seniman terkenal, Fabricius, yang mengunjungi Bali pada awal 1936, menuliskan kesaksiannya: "*De zending zal ook hier vasten voet krijgen en den Balier er toe brengen, zijn verweerde steenen goden als oude heidensche kunst te gaan geringschatten*" (*De Indische Courant*, 1 Februari 1936). (Zending di sini memperoleh pijakan yang kuat dan mendorong orang Bali untuk mengabaikan dewa-dewa batu lama

mereka sebagai seni animisme lama). Kata-kata Fabricius itu telah membuktikan bahwa meskipun ada tantangan kuat dari struktur sosial yang ada, zending akhirnya mampu melakukan terobosan dalam kehidupan masyarakat Bali.

## SIMPULAN

Kristenisasi di Pulau Bali bukan hanya menjadi suatu fenomena keagamaan, tetapi juga suatu objek politik sebagai tipologi pragmatis dari kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda. Sifat pragmatisme yang muncul di sini menunjukkan adanya perbedaan yang ironis dari rezim kolonial terhadap zending dan missi. Dalam struktur kebijakan makro, mereka dianggap sebagai mitra sekaligus sarana yang penting dalam menaklukkan penduduk koloni Hindia Belanda dan memerangi musuh bersama yaitu radikalisme agama sebagai sumber orientasi perlawanan terhadap kekuasaan pemerintah kolonial.

Di Bali, justru pemerintah kolonial menjadi lawan dan kendala utama bagi Kristenisasi dengan alasan yang tidak biasa dijumpai dalam paradigma politik dominasi: pelestarian budaya. Pragmatisme politik dalam hal ini berubah menjadi ketidakkonsekuensi dan terbukti dalam perdebatan yang tidak pernah selesai dalam *Volksraad* maupun Parlemen Belanda. Politisasi agama menjadi bukti bahwa kebijakan dan sikap netral rezim kolonial terhadap agama, sebagaimana tercantum dalam undang-undang kolonial (*staatsregeling*), tidak dapat diaplikasikan secara nyata yang tampak dengan jelas melalui pelarangan terhadap aktivitas zending di Bali.

Dalam konteks Kristenisasi, Bali merupakan suatu fenomena khusus dibandingkan dengan daerah lain di Hindia Belanda. Selain terdapat pelarangan terhadap aktivitas zending dan missi, Bali juga menunjukkan perbedaan dengan dua daerah terlarang lainnya bagi zending yaitu Aceh dan Banten. Di kedua daerah yang disebut terakhir itu, Belanda takut terhadap reaksi massa yang menjadikan Islam sebagai basis ideologi dan orientasi politiknya. Akan tetapi, alasan seperti itu tidak ada di kalangan pemeluk Hindu di Bali. Beberapa peneliti dan pejabat

Belanda mengakui bahwa orang Bali tidak memiliki benih-benih radikal keagamaan. Unsur pragmatisme, yaitu bahwa komunitas Hindu dapat dimanfaatkan sebagai mitra untuk memerangi kekuatan Islam radikal sebagai musuh utama kolonial, lebih menjadi pertimbangan bagi pemerintah untuk mencegah masuknya zending di Bali. Dalam hal ini jelas bahwa telah terjadi politisasi terhadap agama sebagai sarana untuk mendukung tujuan kolonial.

Bagi lembaga zending sendiri, Bali menjadi daerah khusus sebagai *arena*. Lembaga-lembaga zending memerlukan strategi khusus karena mereka menghadapi suatu *arena* yang berbeda dari tempat lain dan memiliki latar struktur sosial dan budaya yang unik. Meskipun pemerintah melarang aktivitas zending, struktur yang dibangun oleh Belanda masih memungkinkan bagi terjadinya interaksi yang terbukti dari aktivitas penyiaran Injil di kalangan orang Cina di Bali Selatan. Keberhasilan membaptis puluhan orang Cina di daerah itu digunakan sebagai titik awal dan modal bagi zending untuk memperluas aksinya di Bali.

Dalam perkembangan selama sekitar 50 tahun, zending dan misi Kristen berperan sebagai agen perubahan. Berbekal pengalaman di berbagai wilayah termasuk di luar Hindia Belanda sebagai *habitus*-nya, lembaga Kristenisasi mencoba memulai karyanya di Bali. Akan tetapi, di arena yang berbeda, upaya mereka tidak selalu berhasil karena struktur cenderung menutup kesempatan itu. Selama perkembangan ini agen berupaya keras melakukan interaksi dengan menyusun strategi-strategi baru dalam menghadapi struktur yang terdiri atas dua pilar utama yaitu masyarakat Bali dan rezim kolonial.

## CATATAN

<sup>1</sup>Ekspedisi militer Belanda terhadap Lombok yang berlangsung pada 1894 mengakhiri dominasi rezim Karangasem Bali di pulau ini yang telah berlangsung selama beberapa dekade pada akhir abad XIX.

<sup>2</sup>Bali dalam perkembangan sejarahnya sampai dengan awal abad XX menunjukkan bentuk konfederasi yang terdiri atas kerajaan-kerajaan kecil. Pemerintahan mereka lebih bersifat oligarkis dengan bentuk kesatuan orientasi yang disatukan oleh Hinduisme. Warisan feodal Majapahit dan Mataram yang

sentralistis ternyata tidak dapat diterapkan di Bali. Hanya ada suatu kemiripan dengan pola kekuasaan di Jawa, yaitu dengan menganggap Dewa Agung Klungkung sebagai penguasa paling senior di antara mereka dan dihormati di antara raja-raja. Namun demikian, posisi Dewa Agung Klungkung ini sebenarnya berbeda dari Hayam Wuruk di Majapahit atau Sultan Agung di Mataram.

<sup>3</sup>Perubahan orientasi politik Belanda terhadap Bali juga dipicu oleh merosotnya pengaruh pandangan Etis pada pertengahan dekade kedua abad XX yang sebelumnya selalu menganggap struktur lokal sebagai sumber penderitaan dan keterbelakangan rakyat. Di Bali kondisi khusus ini membantah kebenaran paradigma Etis dan pelestarian struktur lama dalam lingkup pengaruh kolonial menjadi pilihan.

<sup>4</sup>Salah satu kalimat yang diucapkan dalam pidato kenegaraan itu adalah "Sebagai negara Kristen, Belanda wajib mengatur lebih baik posisi hukum umat Kristen pribumi dan membantu zending memperoleh pijakan kuat di kepulauan Hindia dan mencantumkan dalam kebijakan pemerintah tentang kesadaran bahwa Belanda harus memenuhi panggilan suci terhadap penduduk wilayah ini".

<sup>5</sup>Bukti paling jelas tampak dari jalur pendidikan, ketika zending menganggap bahwa pola dan lembaga pendidikan yang selama ini diberikan oleh Islam atau model pendidikan warisan Hinduisme dianggap tidak mampu membawa kemajuan ilmu pengetahuan bagi anak-anak dan masyarakat pribumi.

<sup>6</sup>Meskipun ada satu arah yang sama, antara keduanya sering juga muncul perbedaan pendapat yang mengganggu kerja sama. Salah satu di antaranya adalah pandangan tentang pelajaran agama. Bagi zending dan misi tentu saja pelajaran agama Kristen sangat dominan dalam kurikulum, sementara pemerintah yang bersikap netral terhadap agama melarang pengajaran agama di sekolah karena dikhawatirkan akan muncul reaksi dari para murid dan masyarakat sekitar. Persoalan pelajaran agama juga sering menjadi pertimbangan dalam pemberian subsidi oleh pemerintah kepada sekolah-sekolah swasta atas dasar agama.

<sup>7</sup>Pandangan demikian telah tertanam pada bangsa Barat sejak berakhirnya perang Salib pada pertengahan milenium kedua. Ketika orang Portugis dan Spanyol datang ke Timur, pandangan mereka yang menjadi prinsip menunjukkan bahwa mereka memiliki misi suci untuk mengkristenkan penduduk di luar Eropa yang dianggap masih barbar atau dianggap terasuki oleh ide-ide radikal yang muncul dari pengaruh ajaran Islam.

<sup>8</sup>Karena struktur sosial dan orientasi politik orang Bali sangat erat kaitannya dengan dunia budaya mereka, para pembuat kebijakan kolonial berpandangan bahwa pelestarian budaya dengan dukungan pemerintah akan mencegah elite dan intelektual Bali bermain politik seperti di Jawa yang akan mengganggu kestabilan dan ketertiban struktur kolonial. Oleh karena itu prinsip *rust en orde* (ketertiban dan ketenangan) diwujudkan dalam bentuk pelestarian struktur sosial budaya Bali yang sangat ketat oleh pemerintah kolonial.

<sup>9</sup>Di antaranya dilaporkan adanya kebiasaan salah seorang penguasa Bali lokal yang memakan daging manusia bertolak dari kepercayaan menambah umur dan kesaktian. Kebiasaan ini bahkan dijadikan aturan pada beberapa desa (*paswara*) untuk mempersembahkan anak-anak sebagai hidangan raja.

<sup>10</sup>Pembaptisan ini berlangsung pada perayaan hari Paskah bulan April 1873. Pendeta yang satunya adalah Mr. Van der Jagt.

<sup>11</sup>Pelaku pembunuhan pendeta de Vroom adalah I Suklana dan Gusti Wayat Urat. Wayan Urat adalah pembantu de Vroom yang sakit hati karena permintaannya untuk meminjam uang ditolak. Keduanya bersama seorang bernama Udin merancang pembunuhan.

<sup>12</sup>Bukti yang jelas adalah para pelaku pembunuhan itu sendiri yang sudah belajar menerima agama Kristen dan menjadi pelayan pendeta J. de Vroom. Gusti Wayan Urat sudah dibaptis sejak 1874 dan merupakan salah satu anggota bangsawan Bali. Ia sering disebut sebagai Nicodemus van Bali “Moord een zendeling gepleegd” dalam *Algemeen Handelsblad*, 12 Oktober 1882. Udin, seorang Jawa Islam yang dibayar oleh Gusti Wayan Urat untuk melakukan pembunuhan langsung dieksekusi. Akan tetapi, eksekusi terhadap Suklana dan Wayan Urat ditunda untuk pengumpulan keterangan lain. Sampai dengan akhir 1882 keterangan itu belum diperoleh sehingga keduanya dibebaskan dari tuduhan.

<sup>13</sup>Misalnya yayasan zending tidak dapat segera memutuskan apakah mereka akan menjamin kehidupan istri dan anak-anak de Vroom, sehingga mereka akhirnya terpaksa berkeliaran di Utrecht untuk meminta sumbangan bagi kebutuhan hidup dan pendidikannya.

<sup>14</sup>Umumnya para pejabat dan pengamat Belanda memandang beberapa aspek yang dianggap berlawanan dengan nilai-nilai kemanusiaan dari tradisi Bali, seperti pembakaran janda secara hidup-hidup sebagai bentuk kesetiaan terhadap suaminya.

## REFERENSI

- “28ste Algemeene vergadering van het Aardrijkskundig Genootschap” dalam *Rotterdam Nieuwsblad*, 16 Februari 1880, lembar ke-2.
- “Actualiteiten uit Bali”, *De Indische Courant*, 9 September 1935.
- “Bali en Zending”, *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 20 September 1924.
- “Bali”, *Soerabajasch Handelsblad*, 6 Juli 1931.
- “Bali Reis”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 1 November 1932.
- “Bali en de Zending”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 18 Februari 1935.
- “Begrooting van Onderwijs”, *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 5 Agustus 1933.
- Bhattacharjee, A. (1981). *Greater India*. New Delhi: Munshiram Manoharlal, 1981).
- “Binnenlandsch” dalam *Arnhemsche Courant*, 22 Desember 1882.
- Boon, J. A. (1977). *The Anthropological Romance of Bali 1597-1972; Dynamic Perspective in Marriage and Caste, Politics, and Religion*. New York: Cambridge University Press.
- “De Islam op Bali”, *Nieuwe Rotterdamsche Courant*, 3 Agustus 1929.
- “De Jaarvergadering der Vereeniging voor Hooger Onderwijs”, *De Heraut voor de Gereformeed Kerken in Nederland*, 28 Juni 1925.
- “De Zending in Ned. Indie”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 15 Oktober 1935.
- “De Zending op Bali”, *De Indische Courant*, 3 Desember 1932.
- “Eenvoudig een Schandaal”, *Soerabajasch Handelsblad*, 8 Agustus 1882.
- “Fabricius en Zending”, *De Indische Courant*, 1 Februari 1936.
- Fasseur, C. (2009). *Wilhelmina*. Hilversum: Balans Uitgeverij.
- Garraghan, G. J. (1957). *A Guide to Historical Method*. East Fordham Road & New York: Fordham University Press.
- Gunning, J. W. (1913). *Zending en Inlandsch Onderwijs: Een Woord naar Aanleiding*

- van de Laatste Kamerdebatten*. Utrecht: Kemmink en Zoon.
- Hanna, W. A. (2016). *Brief History of Bali: Piracy, Slavery, Opium and Guns: Story of an Island Paradise*. Tokyo: Tuttle Publishing.
- “Het Calvinisme op Bali” *De Locomotief*, tanggal 25 Agustus 1877.
- Hindoeïsm” *Java Post*, 17 November 1916.
- Hueting, A. (1914). “Over neutraliteit van heeren Oost Indische bestuur-ambtenaren tegenover de Christelijke Zending”, *Mededeelingen van Nederlandsch Zendingsgenootschap*.
- “In en om de Tweede Kamer” *Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 22 Maret 1933.
- “Ingezonden Stukken”, *Soerabajasch Handelsblad*, 12 September 1881.
- “Ingezonde Stukken”, *De Java Bode*, 1 Desember 1881.
- “Ingezonde Stukken”, *Soerabajasch Handelsblad*, 5 Agustus 1881.
- “Kerk en School”, *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 26 November 1932.
- Koloniaal Verslag over het jaar 1856*.
- Koloniaal Verslag over het jaar 1857*.
- Koloniaal Verslag over het jaar 1864*.
- Koloniaal Verslag over het jaar 1867*.
- Koloniaal Verslag over het jaar 1868*.
- Koloniaal Verslag over het jaar 1870*.
- Koloniaal Verslag over het Jaar 1882*.
- Lekkerkerker, C. “Bali, Zending, en Missie”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 4 Januari 1933.
- “Leestafel”, *Stemmen des Tijds* 1914.
- “Leidraad Zending”, *Gereformeerd Jongelingsblad*, 20 Maret 1914.
- “Lezing Mr. C. Van Helsdingen”, *Soerabajasch Handelsblad*, 2 Desember 1932.
- Loenen, J. (1877). “Zending en Onderwijs”, *Tijdschrift voor Zendingswetenschap*, Vol. 21-22: 187.
- “Martelaarsbloed op Bali”, *Nederlandsch Zendingjaarboekje*, 1 Januari 1904.
- McIntosh, J. “Negotiating Musical Boundaries and Frontiers: Tourism, Child Performers, and the Tourist Ethnographer in Bali, Indonesia” dalam S. Kruger and R. Trandafoiu (2014). *The Globalization of Musics in Transit: Music Migration and Tourism*. New York: Taylor and Francis.
- “Nederlandsche Kolonien”, *Algemeen Handelsblad*, 31 Agustus 1881.
- “Niet officiële Gedeelte” *Surinaamsch Courant en Gouvernement Advertentie*, 24 November 1881.
- Nieuwstjes van Soerabajasch Handelsblad”, *Soerabajasch Handelsblad*, 16 Maret 1882.
- Over Bali”, *De Indische Courant*, 28 November 1932.
- Protschy, S. *Images of Tropics: Environment and Visual Culture in Colonial Indonesia*. Leiden: KITLV Press.
- “Regering en neutraliteit”, *Bataviaasch Nieuwsblad*, 6 Desember 1932.
- Robinson, G. (1998). *The Dark Side of Paradise: Political Violence in Bali*. Ithaca: Cornell University Press.
- Spielvogel, J. J. (2012). *Western Civilization*. Boston: Wadsworth Publ.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie*, Tahun 1849 No. 39.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie*, tahun 1866, No. 6.
- Staatsblad van Nederlandsch Indie*, Tahun 1907 No. 449.
- Suminto, H. A. (1985). *Politik Islam Hindia Belanda: Het Kantoor voor Inlandsche Zaken*. Jakarta: LP3ES.
- “Uit den Volksraad”, *Het Nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie*, 16 Februari 1933.
- van der End, T. (2006). *Sumber-Sumber Zending tentang Sejarah Gereja di Jawa Barat 1858-1963*. Jakarta: BPK Gunung Mulia.
- van der Kraan, A. (1990). *Lombok: Conquest, Colonization, and Underdevelopment 1870-1940*. Portsmouth: Heineman Educational Book.
- van Eck, B. (1877). “De Zending en de Balienezen”, *De Standaard*, 9 Juli 1877.
- van Eck, R. (1879). “Bali”, *Tijdschrift voor Nederlandsch Indie*, Jilid I: 170.
- van Eerde, J. C. (1911). “Hindu Javaansche en Balische Eeredienst”. *Bijdrage tot Koninklijk Instituut*.

- Wener, M. J. (1995). *Visible and Invisible Realm: Power, Magic and Colonial Conquest in Bali*. Chicago: The University of Chicago Press.
- Woller, J. (1943). *Als officier van gezondheid naar Nederlandsch Indie*. Utrecht: Erven J. Bijleveld.
- “Zending en Missie in Bali”, *De Indische Courant*, tanggal 21 Februari 1935.
- “Zending op Bali gewenscht”, *Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch Indie*, 25 Mei 1932.
- “Zending, Evangelisatie en School”, *De Heraut voor Gereformeerde Kerken in Nederland*, 18 Januari 1925.